

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan sebuah usaha dijalankan guna menciptakan kesejahteraan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang berada pada kawasan kota hingga pedesaan. Namun secara realita saat ini masih terjadi ketimpangan kota dengan desa yang terbilang cukup tinggi. Berdasarkan hasil survey yang diambil dari Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan antara kota dan desa per september 2022 memiliki perbedaan sebesar 1,06 persen, dimana indeks kedalaman kemiskinan perkotaan berada di angka 1,10 persen sedangkan indeks kedalaman kemiskinan perdesaan berada di angka 2,16 persen (Badan Pusat Statistik, n.d.).

Desa adalah kawasan administrasi paling bawah yang telah dinobatkan untuk kegiatan pembangunan. Kegiatan yang dilakukan untuk membangun desa ini bukan sesuatu yang asing. Berbagai aspek telah mencoba berbagai cara untuk menekan angka kesenjangan untuk pembangunan perdesaan juga perkotaan yang menyimpang khususnya pada pembangunan pada sektor ekonomi rakyat (Fithriyana, 2020). Sesuai pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sesungguhnya setiap desa membutuhkan pemberdayaan serta perlindungan supaya tetap menjadi perdesaan yang kuat, maju dan mandiri (Undang-Undang Republik Indonesia Desa, n.d.). Pembangunan desa adalah bagian dari faktor yang berpengaruh untuk melakukan pembangunan daerah, penekanan angka kemiskinan serta penekanan angka kesenjangan antar wilayah.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 (RI, 2020) pemerintah memberikan kebebasan pada pemerintah desa sebagai bentuk usaha menciptakan desa yang bersifat otonom dalam pembangunan serta pengembangan daerahnya dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Desa. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan usaha yang dimiliki desa serta dijalankan atau dimanajemen oleh penduduk dan dibantu pemerintahan desa dalam usaha memperbaiki kesenjangan ekonomi yang terjadi di desa serta disusun berdasarkan tingkat kebutuhan juga potensi yang dimiliki desa

(Departemen Pendidikan Nasional, 2017). BUMDes juga memiliki peran menjadi lembaga sosial (social institution) serta lembaga komersial (commercial). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berperan menjadi lembaga sosial berfokus dan memihak atas kepentingan masyarakat dengan kontribusi dengan fasilitator pelayanan sosial. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berperan untuk lembaga sosial berfokus untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan berkontribusi untuk fasilitator pelayanan sosial. Pada sisi lain BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang memiliki peran sebutan lembaga komersial memiliki tujuan untuk menciptakan keuntungan dengan cara menawarkan sumber daya lokal seperti diantaranya barang serta jasa kepada pasar umum. Untuk menerangkan usaha tersebut asas efisiensi serta asas efektifitas harus dituntut untuk dilakukan penekanan. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang juga berfungsi menjadi badan hukum, disusun atas susunan perundang-undangan sebagaimana berlaku semestinya, serta sama sesuai pada perjanjian yang dibangun dan telah disetujui oleh seluruh warga penduduk. Oleh karena itu, perwujudan Badan Usaha Milik Desa dapat beraneka ragam pada tiap-tiap desa di semua penjuru negara ini. Berbagai wujud Badan Usaha Milik Desa ini disesuaikan pada karakter lokal, potensi, serta sumber daya dalam setiap desa (Putra, 2015).

Peningkatan dasar ekonomi pada area pedesaan telah lama dilakukan oleh pemerintah dengan pembuatan bermacam-macam program yang mendukung dan relevan. Namun usaha tersebut belum menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan Bersama. Hal ini disebabkan oleh faktor yang lebih dominan yaitu intrusi pemerintah terlalu dalam yang mengakibatkan menghambatnya tingkat kreatif dan inovatif yang dimiliki masyarakat bagian desa pada bentuk pengelolaan serta melaksanakan aktivitas perekonomian desa. Teknik dan metode lembaga bagian perekonomian di desa tidak dapat berlangsung secara totalitas dan berkaitan dengan ketergantungan dengan dukungan dari pihak pemerintah yang dapat memotivasi kemandirian (Widyastuti, 2017).

Menurut pada teori tersebut semestinya keberadaan desa dapat menarik perhatian yang lebih baik lagi dari sektor pemerintah pusat didukung dengan hadirnya berbagai peraturan-peraturan yang berhubungan pada pemberdayaan ekonomi serta dijalankan dengan menampung juga mengorganisasikan aktivitas

ekonomi warga setempat. Olehnya pemerintah menjalankan tata cara terbaru yang nantinya dapat mendorong serta menjalankan kegiatan perekonomian pada masyarakat desa dengan cara menciptakan lembaga sektor perekonomian yang sepenuhnya diatur dan dijalankan warga desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta dinobatkan sebagai program yang diandalkan guna meningkatkan kemandirian sektor ekonomi pada desa (Widyastuti, 2017).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tercipta sebagai upaya pendekatan terbaru pada usaha guna mengembangkan ekonomi pedesaan dengan basis keperluan serta sumber daya pada desa. Manajemen Badan Usaha Milik Desa seluruhnya dilaksanakan oleh warga pedesaan setempat dengan sistem penerapannya dari desa dan kembali pada desa. BUMDes beroperasi dengan cara menampung berbagai aktivitas perekonomian warga setempat yang berbentuk lembaga atau perusahaan yang dijalankan dengan profesional, tetapi berdasarkan dengan bentuk sumber daya yang dimiliki desa. Kegiatan ini dinilai dapat mendorong warga menjadi kearah produktif serta efektif. Badan Usaha Milik Desa memiliki fungsi sebagai tonggak kemandirian pada negeri serta sebagai bagian kelembagaan yang menjalankan seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan ikon desa untuk mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan aktivitas yang dijalankan oleh BUMDes nantinya juga diharapkan dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat pada desa dengan sistem pelayanan yang ada sesuai dengan kriteria masing-masing desa (Dwiyantoro, 2019).

Pembentukan serta manajemen BUMDes adalah suportif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel serta sustainable. Oleh karenanya memerlukan kinerja yang serius untuk menjalankan BUMDes kearah yang lebih efektif, dan efisien serta proporsional dan juga mandiri. Agar dapat menggapai arah BUMDes dijalankan melalui penyediaan seluruh keperluan baik kebutuhan produktif dan kebutuhan konsumtif warga dengan cara melayani pendistribusian berupa barang dan juga jasa yang diatur secara kolaborasi antara warga desa dan pemerintah desa. Maksud serta fungsi BUMDes menurut (PDTT, n.d.) antara lain yaitu : 1) memberikan peningkatan kegiatan ekonomi desa; 2) memberikan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Desa; 3) memberikan peningkatan pengendalian sumber daya

desa dengan disesuaikan pada tingkat keperluan masyarakat; 4) dijadikan sebagai pijakan perkembangan ekonomi serta pemerataan ekonomi desa.

Berbagai kegiatan serta berbagai program sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada daerah pedesaan sangat penting dilakukan. Beberapa program yang bisa dijalankan layaknya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dipercaya dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat seperti meningkatnya pendapatan masyarakat. Pemberdayaan merupakan bagian dari rencana pembangunan yang berfokus pada hal yang prinsipil serta masyarakat di sekitarnya yang dimulai dari aspek intelektual atau SDM, dan diikuti dengan aspek fisik juga material, hingga menjangkau pada aspek manajerial (Kushartono, 2016).

Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan berbagai aktivitas seperti peningkatan prakarsa serta swadaya masyarakat, pembenahan lingkungan serta perumahan, usaha perekonomian pada desa yang dikembangkan, Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang dikembangkan, juga berbagai aktivitas yang dianggap dapat memberikan efek baik pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk produksi yang lebih baik. Memberdayakan masyarakat merupakan usaha dalam peningkatan harkat juga martabat pada lapisan masyarakat terbawah (grass root), yang pada keadaan saat ini belum dapat membebaskan diri dari jebakan kemiskinan. Dengan arti lain, pemberdayaan (empowering) merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan dan menciptakan kemandirian masyarakat miskin (Dwiyantoro, 2019).

Dari 29 Kabupaten yang terletak di Jawa Timur hampir seluruhnya telah memiliki BUMDes, dimulai dari BUMDes yang berdiri mandiri dengan melakukan pengembangan pada potensi desanya hingga BUMDes yang ditunjang oleh pemerintah di masing-masing Kabupaten dengan adanya pemasukan modal yang berasal dari APBD dengan dana hibah dimana berstatuskan dana masyarakat desa hingga menjadi saham yang dikelola BUMDes. Dari 29 Kabupaten yang berada di Jawa Timur, penelitian ini akan berfokus pada salah satu diantaranya yang disebut Kota Batu serta lebih menitik fokuskan penelitian pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji yang memiliki nama BUMDes Raharjo Desa Pandanrejo. Pada BUMDes Desa Pandanrejo ini mengelola

sebuah wisata petik stroberi dengan nama tempat “Lumbung Petik Stroberi” yang banyak diminati oleh wisatawan. BUMDes ini didukung dari berbagai kalangan, seperti Pemerintah Kota Batu yang memfasilitasi pelatihan kepariwisataan dengan tujuan masyarakat dapat menjadi guide profesional untuk wisatawan, dukungan dari kampus sekitar serta dukungan dari Kaliwatu Group. BUMDes Raharjo juga meraih juara BUMDes terbaik se Kota Batu pada HUT Kota Batu ke 18. Selain itu BUMDes Raharjo juga meraih predikat juara 3 kategori social media dan digital marketing pada kegiatan BUMDes Award ITS 2020.

Berdasarkan (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007) terdapat 10 kegiatan yang harus dijalankan guna mempersiapkan dalam mendirikan BUMDes yaitu: 1) Mendesain struktur atau susunan organisasi; 2) Menyusun job deskripsi (menggambarkan pekerjaan); 3) Menentukan sistem koordinasi; 4) Melakukan penyusunan aturan kerjasama bersama pihak ketiga; 5) Melakukan penyusunan pedoman kerja organisasi BUMDes; 6) Melakukan penyusunan bentuk sistem informasi; 7) Merancang rencana usaha (business plan); 8) Penyusunan sistem administrasi serta pembukuan; 9) Menjalankan proses rekrutmen; 10) Penetapan sistem penggajian serta perubahan. Berdasarkan tahapan persiapan pendirian BUMDes tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai proses pembentukan BUMDes namun hanya dibatasi hingga poin ke 3 yang kemudian hanya akan mengulas mengenai: 1) Mendesain struktur atau susunan organisasi; 2) Menyusun job deskripsi (menggambarkan pekerjaan); 3) Menentukan sistem koordinasi.

Pembatasan pembahasan ini dikarenakan latar belakang dari objek yang diambil sebagai bahan penelitian yaitu BUMDes Raharjo yang baru saja kembali aktif pada bulan Oktober 2023 setelah non aktif sedari tahun 2020 akibat dari adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak penurunan pada kinerja BUMDes Raharjo dan menyebabkan tidak terlaksananya usaha BUMDes Raharjo secara efektif.

Namun dari berjalannya BUMDes Raharjo Desa Pandanrejo yang telah memiliki predikat berbagai juara ini kegiatan BUMDes telah terhenti sedari tahun 2020 hingga September 2023 yang diakibatkan oleh wabah covid-19 yang menurunkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke lumbung stroberi dan akibat

faktor internal seperti tidak terbentuknya kembali kader BUMDes. Masyarakat Desa Pandanrejo Sebagian besar juga masih banyak memiliki usaha sendiri atau memiliki mata pencaharian tetap diluar pertanian stroberi yang menjadi ikon Desa Pandanrejo, padahal Lumbung Stroberi ini berperan sebagai pemberdaya serta menampung hasil tani stroberi masyarakat untuk dibantu dalam memasarkan produk. Saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 omset yang dihasilkan tembus pada angka Rp. 70.000.000,00 dalam satu bulan. Pernyataan ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Yudistira Dwi K yang merupakan anggota dari BUMDes Raharjo unit stroberi segar sebagaimana:

“Saat sebelum BUMDes non aktif, pada tahun 2019 Lumbung Stroberi pernah mendapatkan omset sebesar Rp. 70.000.000 dalam satu bulan, ini juga karena saat itu Lumbung kedatangan wisatawan yang mencapai 1000 pengunjung lebih dalam satu hari.”

Dalam satu tahun masa kerja Petani stroberi dari 2018 hingga 2019 dengan omset perbulan yang dihasilkan yang terbilang cukup fantastis ini dapat disimpulkan bahwa petani stroberi yang terkumpul pada Lumbung Stroberi dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat yang beroperasi pada bidang pertanian stroberi baik buah segar maupun produk olahan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tata kelola BUMDes Raharjo Desa Pandanrejo?
2. Aspek apa yang mempengaruhi BUMDes dalam mendukung *Grassroot Economic Empowerment*?

B. Tujuan Penelitian

Atas dasar kajian yang ingin dijalankan oleh penulis, sehingga tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai “Tata Kelola BUMDes Raharjo Guna Mendukung *Grassroot Economic Empowerment* (Studi Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”

Manfaat Penelitian

Atas dasar kajian yang akan dilakukan, maka didapatkan beberapa manfaat pada penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini ditujukan untuk menjadi bahan referensi lanjutan dan sekaligus sebagai bahan literasi tambahan mengenai “Tata Kelola BUMDes Raharjo Guna Mendukung Grassroot Economic Empowerment (Studi Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)” serta penelitian ini juga dapat dijadikan bahan tolak ukur untuk dilakukannya penelitian yang selaras dengan tema yang penulis kaji, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan yang secara teoritis.

b. Manfaat Praktis

1). Bagi Penulis

Penelitian ini juga diinginkan untuk dapat dijadikan sebagai sarana yang memiliki manfaat untuk menyalurkan pengetahuan penulis yang berkaitan dengan “Tata Kelola BUMDes Raharjo Guna Mendukung Grassroot Economic Empowerment (Studi Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”

2). Bagi Obyek Penelitian

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan di kemudian hari. Sehingga, BUMDes Raharjo Desa Pandanrejo dapat memberikan evaluasi apabila terdapat sebuah kesalahan ketika sedang menentukan sebuah keputusan.

3). Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi guna memperluas ilmu pengetahuan juga sebagai tolak ukur untuk peneliti berikutnya khususnya yang berkaitan tentang “Tata Kelola BUMDes Raharjo Guna Mendukung Grassroot Economic Empowerment (Studi Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”.

C. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah pengertian yang akan diturunkan menjadi penjabaran umum dengan kejadian tertentu yang memuat penjabaran terkait berbagai konsep pada penelitian yang dijalankan. Maka dari itu, dalam menjabarkan penjelasan secara lebih jauh pada penelitian maka membutuhkan penjabaran yang membahas tentang arti atau terminologi berkaitan pada topik pembahasan supaya variable maupun konsep yang akan dihitung serta digali agar data-data mendapatkan kejelasan.

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat yaitu “Tata Kelola BUMDes Raharjo Guna Mendukung Grassroot Economic Empowerment (Studi Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”, maka dari itu memerlukan pendefinisian segenap konsep berkaitan pada tema yang diangkat pada penelitian diantaranya :

a. Tata Kelola

Tata Kelola (governance) adalah suatu metode yang dipakai oleh sebuah organisasi maupun masyarakat guna menanggulangi permasalahan yang timbul (H.M & Abdillah, 2011), penjabaran lainnya mengenai tata tata Kelola (governance), yakni penggunaan lembaga-lembaga, susunan-susunan otoritas dan hingga kerjasama untuk mendistribusikan sumber data serta mengatur aktivitas di masyarakat atau ekonomi (H.M & Abdillah, 2011).

Secara harfiah, tata Kelola merupakan usaha sistematis pada proses tertentu dalam menggapai tujuan bersama pada suatu kelompok, dengan prinsip-prinsip manajemen yang mencakup fungsi perencanaan , pelaksanaan, pengendalian,serta evaluasi. Dengan ini, tata kelola memiliki maksud utama yakni untuk menjalankan manfaat, meminimalisir terjadinya resiko, dan pengoptimalan sumber daya (Zamzami et al., 2018).

Menurut Kooiman (1993) tata kelola adalah susunan kegiatan atau suatu tahapan korelasi sosial politik di antara pihak pemerintah dengan warga pada berbagai aspek yang bersangkutan

pada seluruh kepentingan warga serta intervensi pemerintah berdasarkan kepentingan warga tersebut.

b. BUMDes

Dikutip dari (Mahmudah, 2018), BUMDes merupakan perusahaan yang dijalankan pada ranah pemerintah desa yang bertujuan mewujudkan kegiatan usaha desa dengan mengelola potensi desa sesuai dengan kebutuhan. BUMDes memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan bantuan yang berasal dari pihak pemerintah desa bersumber dari dana desa yang dinyatakan sebagai bisnis untuk dapat mengurangi permasalahan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan jika pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, mencakup: 1) hasil usaha asli desa; 2) hasil dari sumber daya desa; 3) hasil swadaya serta kontribusi; 4) hasil kerja sama; serta 5) PAD secara legal. Penjabaran dari pasal 107 ayat (1) menyatakan jika pemberdayaan yang bersumber pada sumber daya desa untuk mengembangkan sumber PAD yang dijalankan menggunakan cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melakukan kolaborasi bersama pihak ketiga, serta wewenang memberikan pinjaman (Pemerintah Daerah, 1999).

Arti yang lainnya mengenai BUMDes pada pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menjelaskan jika BUMDes merupakan sebuah bisnis milik desa yang didirikan pihak pemerintah desa serta didalamnya dana juga manajemen dijalankan pemerintah daerah serta warga desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010).

c. *Grassroot* (Lapisan Masyarakat Bawah)

Grassroot atau lapisan masyarakat bawah merupakan contoh dari stratifikasi sosial dalam hal ekonomi. Menurut (Umanilo, 2014). Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep yang

memperlihatkan adanya perbedaan atau pengelompokan pada suatu golongan sosial secara bertingkat seperti pada komunitas terdapat strata tinggi, strata sedang hingga strata rendah.

Dalam (Maunah, 2015) menurut (Aziz, 2005) stratifikasi sosial merupakan sistem yang digunakan untuk membedakan individu maupun kelompok pada kalangan masyarakat yang membaginya pada kelas sosial yang berbeda secara hierarki juga memberikan hak serta tanggung jawabnya yang berbeda antara lapisan satu dengan lainnya.

Atas dasar penjabaran yang telah diberikan sebelumnya, maka *Grassroot* atau lapisan masyarakat bawah merupakan stratifikasi sosial pada hal ekonomi pada kelas bawah, golongan ini seperti halnya pekerja, petani rendah dan sering kali mengalami kendala dalam mengakses layanan publik, sumber daya, serta juga kesempatan pekerjaan.

d. *Economic Empowerment* (Pemberdayaan Ekonomi)

Menurut (Suharto, 2017) Pemberdayaan (*empowerment*) secara konsep bermula pada “*power*” yang memiliki arti kewenangan. Maka dari itu ide utama pada pemberdayaan bersinggungan pada konsep yang berkaitan dengan kekuasaan, serta sering dihubungkan dengan kemampuan makhluk hidup untuk membuat orang sekitar melakukan sesuatu sesuai arahan yang diinginkan diluar dari keinginan mereka.

Menurut (Ginjar, 1996) pemberdayaan merupakan kegiatan yang bertujuan mengembangkan kekuatan atau potensi dengan sistem melakukan pendorongan, memberikan motivasi, serta menumbuhkan pengetahuan yang lebih luas pada potensi sekitarnya dan berusaha mengembangkan dengan memperkuat potensi pada masyarakat.

Disisi lain para ahli juga menekankan bahwa pemberdayaan mencakup 3 aspek yakni, pengembangan atau peningkatan

(*enabling*), potensi yang diperkuat (*empowering*), serta menumbuhkan rasa mandiri.

Sehingga, pemberdayaan ekonomi adalah bentuk usaha untuk mendukung, memotivasi, serta membentuk pengetahuan masyarakat mengenai potensi dimiliki juga agar memiliki usaha agar terus melakukan pengembangan. Adanya pemberdayaan ekonomi juga menciptakan daya saing tinggi pada masyarakat serta mampu mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing.

Dikutip (Christenson et al., 1989) dalam buku yang ditulis oleh (Soetomo, 2006), Biddle (1965) merekomendasikan 6 tahapan guna mendorong pertumbuhan kompetensi masyarakat, yaitu:

1. *Exploratory*: pada tahap ini berisikan kegiatan untuk mengetahui keadaan, situasi serta potensi yang dimiliki masyarakat, pada tahap ini juga dimanfaatkan untuk menggali informasi guna melanjutkan tahap selanjutnya.
2. *Organizational*: pada tahap ini digunakan untuk media pertemuan serta diskusi kedua belah pihak antara petugas dan masyarakat atau antara masyarakat.
3. *Discussional* (diskusi): pada tahap ini berisikan kegiatan untuk berdiskusi antar warga kepada inventarisasi dengan sekaligus pemecahan masalah, juga untuk membuat keputusan kegiatan yang akan dilakukan serta pembentukan rencana jalannya .
4. *Action* (kegiatan): tahapan ini mengenai pelaksanaan yang telah ditentukan Bersama, serta pelaporan hingga evaluasi hasil.
5. *New Project*: tahap ini mengulang kegiatan saat berdiskusi untuk menentukan permasalahan prioritas serta pembuatan rencana.
6. *Continuaton*: pada tahap ini jalannya pembangunan berdasarkan pada prakarsa masyarakat yang telah dianggap

melembaga. Sehingga petugas dapat melepaskan masyarakat secara mandiri.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan mengenai cara dari suatu penelitian akan ditelisik juga sistem apa yang dikelola guna menunjang keberhasilan penelitian. Definisi operasional memiliki implikasi praktis dalam proses mengumpulkan data. Sehingga, definisi operasional bukanlah definisi teoritis (Studi & Kesehatan, 2019). Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Tata Kelola BUMDes Raharjo Guna Mendukung *Grassroot Economic Empowerment* (Studi Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)” terdapat berbagai indeks yang diterapkan pada penelitian ini untuk mengetahui variabel berdasarkan judul yang tertera berdasarkan pada (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007) sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan, ini digunakan sebagai pengukuran kinerja implementasi dari kebijakan adanya Lumbung Stroberi yang pastinya terdapat standar dan sasaran yang akan dicapai oleh *stakeholders* perencana dan pelaksana Lumbung Stroberi.
2. Mendesain susunan organisasi, BUMDes ialah sebuah kelompok atau organisasi, maka memerlukan susunan organisasi untuk menjelaskan bagian pada pekerjaan mencakup seluruh isi organisasi atau kelompok tersebut. Jaringan pekerjaan (instruksi atau kewajiban, konsultatif, serta tanggung jawab) diantara anggota atau pelaksana BUMDes.
3. Penyusunan job deskripsi atau gambaran pekerjaan, penyusunan job deskripsi untuk seluruh pelaksana BUMDes yang digunakan untuk menjelaskan peran pada setiap individu. Maka dari itu, tugas, wewenang, juga tanggung jawab yang memiliki jabatan meminimalisir terjadinya duplikat untuk setiap jabatan/pekerjaan yang berada pada BUMDes dan diisi oleh anggota yang memiliki kompeten pada masing-masing bidangnya.

4. Menentukan sistem koordinasi, yang dimaksud koordinasi adalah kegiatan yang menggabungkan berbagai arahan yang bersifat parsial menjadi tujuan atau arahan yang sama. Dengan adanya penentuan sistem koordinasi secara efektif memberikan peluang tercipta kolaborasi diantara pengelola usaha dengan lintas desa dengan baik

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah cara penelitian bertujuan untuk mendalami dan mengerti permasalahan berdasarkan penyusunan atas gambaran kompleks serta komprehensif berdasarkan perspektif yang rinci. Menurut (Nazir, 2003) metode deskriptif merupakan metode menilai sifat sekelompok orang, suatu benda, sekumpulan benda, sistem pemikiran, atau kategori peristiwa kontemporer. Tujuan dari karya deskriptif ini adalah untuk menciptakan suatu rencana, gambaran, atau desain benda, sifat, dan hubungan antar objek yang diamati secara runtut, akurat, dan menyeluruh.

2. Sumber Data

Penyusunan penelitian tidak saja berdasar pada data primer, namun dilengkapi data sekunder. Data primer penelitian diperoleh baik dari informasi yang diberikan oleh lembaga maupun dari hasil wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait. Data sekunder merupakan informasi mengenai penelitian penulis terdahulu yang diperoleh dari internet, buku, majalah dan subjek penelitian utama penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan menggunakan 3 metode. Tiga metode ini antara lain dilakukan dengan wawancara yang dilakukan bersama pemangku kepentingan yang bersangkutan, dilanjutkan dengan observasi yang mengamati secara langsung pada tempat penelitian dilakukan dan didukung dengan dokumentasi serta mengumpulkan berbagai data pendukung atau dokumen yang berkaitan juga telah menjadi penelitian sebelumnya. Pengumpulan data yang

dilakukan dengan dokumentasi berasal pada internet, jurnal, buku maupun sesuatu yang memiliki terkait dengan beberapa penelitian terdahulu serta yang berhubungan dengan focus tinjauan penulis.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang sifat, watak atau keadaannya yang diteliti dan berguna dalam memberikan informasi tambahan mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini pemilihan subjek dilakukan dengan metode purposive sampling dan ditentukan kebutuhannya berdasarkan kriteria tertentu. Menurut (Sugiyono, 2018) purposive merupakan suatu Teknik untuk menentukan sampel menggunakan beberapa pertimbangan. Untuk menguji validasi informasi, maka ditentukan subjek dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- A. Kepala Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu
- B. Direktur BUMDes Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu
- C. Unit Usaha BUMDes Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu
- D. Kader Lumbung stroberi Desa Pandanrejo
- E. Masyarakat Kawasan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia.

6. Teknik Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis kualitatif dilakukan secara kolaboratif dan cermat, memastikan bahwa data tersedia di satu tempat. Tingkat akses terhadap informasi ditandai dengan tidak adanya informasi tambahan dan tersedianya informasi baru. Proses analisis data diawali dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan pengendalian.

Pekerjaan pengumpulan data pada penelitian kualitatif langsung dilakukan dengan pengerjaan menulis, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikan data. kegiatan ini dilaksanakan untuk meminimalisir adanya fragmen-fragmen yang tidak berarti dan lupa akan kejadian lapangan.